



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Bidang Hubungan Industrial;
- d. Bidang Transmigrasi;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 6

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3

Bidang Hubungan Industrial

Pasal 8

- (1) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Industrial membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan;
 - b. Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4

Bidang Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Transmigrasi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5

UPT

Pasal 12

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 19

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja

meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 21

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas *menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan* dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Industrial

Pasal 25

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang hubungan industrial meliputi persyaratan kerja, pengupahan, penyelesaian perselisihan, kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial meliputi persyaratan kerja, pengupahan, penyelesaian perselisihan, kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang hubungan industrial meliputi persyaratan kerja, pengupahan, penyelesaian perselisihan, kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial meliputi persyaratan kerja, pengupahan, penyelesaian perselisihan, kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang hubungan industrial meliputi persyaratan kerja, pengupahan, penyelesaian perselisihan, kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Hubungan Industrial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang persyaratan kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industrial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industrial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Transmigrasi

Pasal 29

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang transmigrasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang transmigrasi meliputi perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Transmigrasi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan persebaran penduduk dan penempatan transmigran, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Transmigrasi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan satuan permukiman pada tahap kemandirian, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Transmigrasi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 34

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 35

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus *menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.*

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

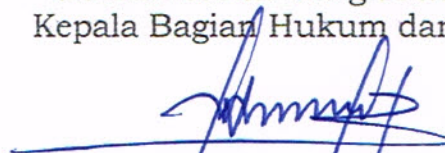
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

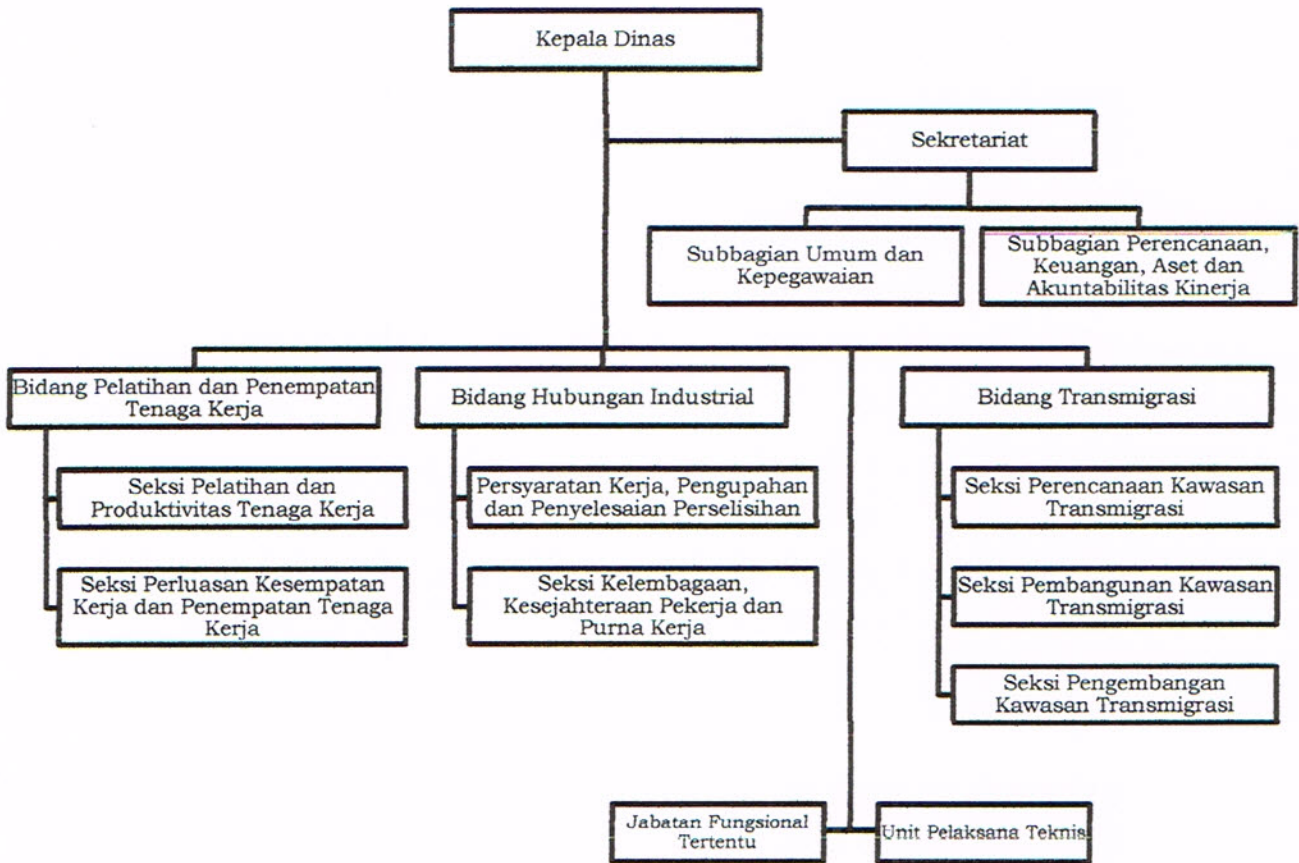
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU

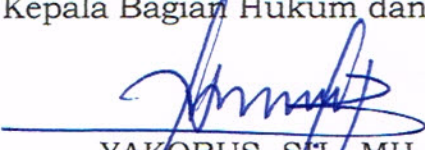


BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002